

EDISI JUMAT, 07 JUNI 2024

HARIAN LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

@lenteratoday

@lenteratoday

lentera.tv

Lentera TV Media

Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) sekaligus
Ketua Komite BP Tapera,
Basuki Hadimuljono
Sumber :x/@kemenPU

MENTERI PUPR DAN MENKEU SEPAKAT TAPERA DITUNDA

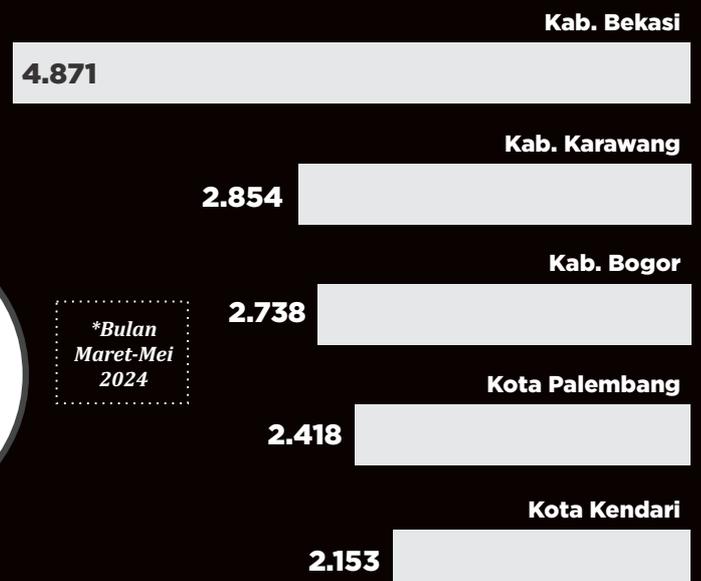
PAK BAS: KALAU BELUM SIAP, KENAPA TERGESA-GESA

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai penundaan implementasi Tapera. Namun, Pak Bas--begitu sapaannya-- mengatakan keputusan final Tapera tetap akan ditentukan dalam undang-undang. Sinyal penundaan menguat karena Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih 2024 - 2029 Prabowo Subianto juga mengatakan saat ini pemerintah masih mencari solusi yang terbaik. Di sisi lain, Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh mengancam akan menggelar demo lebih besar di seluruh provinsi di Indonesia jika pemerintah tidak segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Buruh meminta PP tersebut dicabut selambat-lambatnya 7x24 jam setelah mereka menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Baca di hal 11....

**Government (Hal.2)
Kemenkes:
Ada Dana Rp 200 M
Bagi RS Umum
yang Belum
Siap KRIS**

5 DAERAH DENGAN REALISASI PENYALURAN RUMAH TERBANYAK DARI BP TAPERA MELALUI SKEMA FLPP*



*Bulan
Maret-Mei
2024

Kemenkes: Ada Dana Rp 200 M Bagi RS Umum yang Belum Siap KRIS



Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono (batik biru) saat menghadiri rapat kerja dengan komisi IX di Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan Indonesia Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan pemerintah menyediakan pembiayaan bagi rumah sakit dalam mempersiapkan layanan kelas rawat inap standar (KRIS) yang akan menggantikan sistem kelas 1, 2 dan 3 dalam BPJS Kesehatan.

Dante mengatakan dukungan pemerintah diberikan kepada rumah sakit yang belum memenuhi kriteria KRIS. Dari data terakhir, ada sebanyak 63 RS yang belum sama sekali memenuhi 12 kriteria utama KRIS. Adapun, 12 kriteria ini mencakup jumlah tempat tidur, kamar mandi, outlet oksigen hingga pendingin ruangan.

Menurutnya, pemerintah memberikan dukungan dana untuk rumah sakit pemerintah tipe A dengan dana dari BLU dan BLUD sebesar Rp 200 miliar - Rp 400 miliar per tahun. Kemudian, tipe B mendapatkan dukungan Rp 50 miliar per tahun.

"Untuk D dan C ini, kami bantu dan bantuannya diberikan dari DAK sebesar Rp 2,5 miliar per tahun," kata Dante.

Adapun, syaratnya RS ini belum memenuhi kriteria 8-12, yakni jumlah tempat tidur, kamar mandi hingga outlet oksigen. Selain itu, dana diberikan kepada RS yang terletak di daerah dengan fiskal rendah.

Sementara itu, untuk RS swasta, Dante mengatakan pemerintah mendorong penggunaan dana mandiri.

"Tetapi kami (Kemenkes) terus melakukan bimtek ke RS swasta," tegasnya.

Dante menuturkan dari survei per 20 Mei 2024, baru sebanyak 2.316 RS atau 79,05% yang benar-benar siap menerapkan KRIS. Rumah sakit ini sudah memenuhi 12 kriteria KRIS, a.l. tempat tidur, akses kamar mandi, dan outlet oksigen. Hanya 63 RS atau 13,12% yang belum memenuhi.

"Jadi memang banyak yang sudah penuh kriteria KRIS. Ada 12 kriteria sebagian besar hanya sudah memenuhi yang 12 itu," kata Dante.

Tarif Ditetapkan Juli 2025

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menyebutkan besaran iuran untuk sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Penetapannya tepat sehari setelah sistem KRIS mulai diterapkan, yakni 30 Juni 2025.

"Penerapan KRIS akan dimulai paling lambat 30 Juni 2025. Tarif dan iuran paling lambat akan ditetapkan 1 Juli 2025. Jadi setelah penetapan, satu hari kemudian kita akan melakukan penetapan iuran," kata Dante.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Dia menyebut, saat ini belum ada keputusan soal besaran tarif iuran KRIS.

"Belum ada yang fix. Kan di situ dijelaskan, mau nanti dievaluasi dan yang mengevaluasi bukan BPJS," tutur Ali Ghufron saat ditemui di sela istirahat Rapat Kerja bersama Komisi IX.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi

sebelumnya resmi menghapus sistem kelas 1, 2 dan 3 layanan BPJS Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem KRIS. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Regulasi ini telah diteken Jokowi pada 8 Mei 2024 lalu.

Pasal 103B ayat (1) Perpres tersebut mengatakan, penerapan fasilitas ruang perawatan berdasarkan KRIS akan mulai diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia paling lambat 30 Juni 2025.

Sementara pada Pasal 103B ayat (8) Perpres itu, iuran BPJS Kesehatan dengan sistem KRIS akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Penetapan ini didasarkan oleh evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada layanan rawat inap.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun mulai menggodok peraturan menteri kesehatan (Permenkes) yang bakal mengatur teknis sistem KRIS di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sejumlah klausul yang tengah digodok di antaranya kesiapan rumah sakit hingga penyesuaian iuran peserta.

Merujuk pada Pasal 51, peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif. Caranya adalah dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus

12 PERSYARATAN MENGENAI FASILITAS RUANG PERAWATAN PADA PELAYANAN RAWAT INAP BERDASARKAN KRIS

1. Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi.
2. Ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 (enam) kali pergantian udara per jam.
3. Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.
4. Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 (dua) kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur.
5. Adanya nakas per tempat tidur.
6. Dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat celcius.
7. Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan non infeksi).
8. Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter.
9. Tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung.
10. Kamar mandi dalam ruang rawat inap.
11. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas.
12. Outlet oksigen.

dibayar akibat peningkatan pelayanan.

Selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya akibat peningkatan pelayanan dapat dibayar oleh tiga kelompok. Bisa oleh peserta yang bersangkutan, pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan. (wid,rls,ant/dya)

Nadiem Usulkan Tambahan Anggaran Rp 25 Triliun DPR RI: Apa Sudah Dikelola dengan Baik!

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengusulkan tambahan anggaran untuk kementeriaannya, atas pagu indikatif tahun anggaran 2025. Ia menyebut alokasi anggaran itu belum dapat mengakomodir kebutuhan mereka.

Menanggapi permintaan ini, Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, meminta Kemendikbudristek melakukan introspeksi terlebih dahulu, khususnya dalam mengelola anggaran.

"Jangan terperangkap dalam kesedihan karena pengurangan anggaran. Sebaliknya, kita harus bertanya apakah dana yang sudah diberikan selama ini telah dikelola dengan baik atau tidak," katanya dalam laman DPR RI dikutip Kamis (6/6/2024).

Anita menilai Kemendikbudristek tidak memanfaatkan anggaran besar yang tersedia dengan baik karena masih banyak masalah yang ditemukan. Masalah itu antara lain guru PPPK yang sudah lolos seleksi namun belum menerima SK, guru-guru di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang belum menerima tunjangan,

"Serta bangunan sekolah yang rusak dan terbelengkalai meskipun anggaran telah dialokasikan sejak tahun 2021," ujar Anita.

PIP Kemendikbud Jadi Sorotan KPK

Anita juga mengungkapkan jika pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud telah menjadi perhatian KPK.

"(Masukan) kami tak pernah didengar ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi baru seakan-akan Kemendikbud kebakaran jenggot," tegas Anita.

Ia juga mengemukakan adanya Peraturan Sekjen Kemendikbudristek yang menyebutkan bahwa rekomendasi dan temuan dari DPR akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan. Menurutnya, usulan wakil rakyat sebagai lembaga tinggi negara tidak seharusnya diverifikasi oleh dinas di tingkat daerah.

"Jadi kalau mau diverifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas. (Lalu) dinas melakukan verifikasi terhadap sekolah. Hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Saya marah, Pak Menteri, untuk kesekian kalinya," katanya.

Oleh karena itu, Anita meminta jajaran Kemendikbudristek untuk turun ke lapangan. Jangan hanya mendengar penjelasan dari para kepala dinas pendidikan di daerah tetapi harus langsung ke penerima PIP.

"Kalau Anda hanya turun di dinas, semuanya akan bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke orang tua



Eksprei Mendikbudristek, Nadiem Makarim (kanan) kena semprot anggota komisi X DPR, Anita Jacoba Gah saat rapat bersama jajaran pada Rabu (6/5/2024). (Tangkapan layar)

(penerima PIP), kalau tidak orang tua itu punya air mata. Omong kosong. Nama ada, SK ada, uang nol, sampai hari ini," tutupnya.

Dia juga meminta agar pimpinan komisi mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Permintaan itu disampaikan Anita setidaknya dua kali. Anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini kesal dengan pengelolaan anggaran oleh Kemendikbud.

Diketahui, Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (5/6/2024) mengatakan, "Alokasi tersebut belum dapat mengakomodir secara optimal kebutuhan kebijakan baru yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025," ucapnya.

Pagu Indikatif Kemendikbudristek ditetapkan sebesar Rp 83,19 triliun. Jumlah itu tertuang dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menjelaskan, anggaran itu telah diusulkan sebagai alokasi pendanaan wajib, yaitu sebesar Rp 41,5 triliun dan program prioritas lain sebesar Rp 12,19 triliun.

Ia berujar, jika membandingkan antara pagu indikatif 2025 dengan pagu tahun sebelumnya, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pagu berjalan tahun 2024 adalah sebesar Rp 101,3 triliun, sementara pagu indikatif tahun 2025 baru mencapai Rp 83 triliun.

Oleh karena itu, Kemendikbud-

ristek membutuhkan tambahan anggaran untuk memastikan program-program prioritas mereka berlanjut. "Mendikbudristek pun telah mengirimkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 25 triliun dengan sebaran usulan per program," ujar Suharti.

Mahasiswa UGM Minta MA Cabut Aturan Nadiem

Di sisi lain, Empat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madah mengajukan Judicial Review atas Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) nomor 2 tahun 2024. Peraturan itu mengatur tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Aturan ini yang menjadi dasar universitas menaikkan UKT atau uang kuliah tunggal.

Al Syifa Rachman salah-satu pemohon mengatakan, judicial review diajukan karena kekhawatiran, bahwa UKT akan dinaikkan di tahun ajaran berikutnya. Sebab, meski Menteri Kemendikbudristek sudah membatalkan rekomendasi tarif dan persetujuan UKT pada 27 Mei lalu, pembatalan itu hanya berlaku pada tahun ajaran 2024/2025.

"Masih ada kemungkinan biaya kuliah naik tahun depan, maka kami minta Permen ini dicabut seluruhnya," ujar dia saat ditemui selepas mendaftarkan judicial review ke MA pada Kamis, (6/6/2024).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kemudian membatalkan kenaikan UKT melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Dikti Ristek Nomor 0511/E/PR.07.04/2024. Syifa menggarisbawahi aturan yang baru dikeluarkan itu hanya membatalkan UKT dan IPI pada tahun akademik 2024/2024 dan ada kemungkinan akan dinaikkan pada tahun akademik berikutnya.

Artinya, Peraturan Menteri no 2 2024 itu masih berlaku. Peraturan ini

URAIAN PROGRAM ATAS USULAN TAMBAHAN ANGGARAN KEMENDIKBUDRISTEK TAHUN ANGGARAN 2025

- Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun sebesar .

RP 3,8 TRILIUN

- Program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan sebesar

RP 1,37 TRILIUN.

- Program kualitas pengajaran dan pembelajaran sebesar

RP 7,67 TRILIUN.

- Program pendidikan tinggi sebesar

RP 8,56 TRILIUN.

- Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar

RP 2,17 TRILIUN.

- Program dukungan manajemen sebesar

RP 1,38 TRILIUN.

membuka peluang universitas menaikkan UKT dengan persetujuan Kemendikbud. Kampus mendapat kelonggaran menghitungkan beban biaya operasional mahasiswa di setiap jurusan.

Peraturan menteri tersebut hanya mengatur biaya UKT kelompok 1 dan 2, masing-masing Rp 500 ribu dan Rp 1 juta. per semester. Sementara UKT kelompok lain akan mempertimbangkan jenis program studi, indeks kemahalan wilayah dan pencapaian nasional pendidikan tinggi.

Menurut Syifa, tanpa kenaikan saja, mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT masih banyak yang ditolak. "Meskipun ada skema pengajuan keringanan, tapi kalau memang penentuan UKT tidak berdasar pada ekonomi mahasiswa, itu tetap bisa memberatkan," ujar mahasiswa semester 6 itu.

Dari data beasiswa jaring pengaman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa UGM 2023 misalnya, ada sekitar 30 mahasiswa baru yang mengajukan keringanan. Ia menyebut hanya kurang dari 10 mahasiswa yang menerima keringanan. Itu pun persentasinya kecil. (ist,rls, wid/dya)

Gaduh Keponakan Jokowi Jadi Manajer di Pertamina: Direkrut Profesional Sejak 2021

JAKARTA - Salah satu manager non-government relations di Pertamina, Bagaskara Ikhlasulla Arif tengah ramai diperbincangkan publik, baik di media sosial X (dulunya Twitter) maupun Instagram pada Kamis (6/6/2024).

Bagaskara Ikhlasulla Arif adalah keponakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia merupakan putra dari Titik Relawati, adik bungsu Jokowi. Sosok Bagaskara Ikhlasulla Arif menuai sorotan publik usai dikabarkan menjabat manager di PT Pertamina.

"Keponakan Presiden Jokowi Menjadi Manager di Pertamina," tulis unggahan @undercover.id, Kamis (6/6/2024).

Kabar tersebut menjadi riuh lantaran menambah panjang daftar keluarga Jokowi yang menduduki jabatan penting baik di pemerintahan maupun di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Corporate Communication Pertamina Fajar Djoko Santoso mengonfirmasi bahwa Bagaskara Ikhlasulla Arif menjabat sebagai manager non-government relations PT Pertamina (Persero) terhitung sejak Maret 2024. "Benar. (Dia) pertama kali masuk Pertamina tahun 2021 melalui jalur profesional," kata

Fadjar, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/6/2024).

Jalur profesional atau experienced hired adalah perekrutan yang ditujukan bagi calon pekerja yang telah memiliki pengalaman kerja sebelumnya di bidang tertentu. Fadjar mengatakan, Pertamina biasa melakukan rekrutmen melalui experienced hired sesuai kebutuhan dengan melihat kompetensinya. Ia memastikan, perekrutan melalui jalur profesional itu dibuka untuk seluruh pegawai yang berminat dan memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.

"Jabatan dibuka untuk seluruh pegawai. (Siapa pun) yang berminat bisa mendaftar dan mengikuti seleksi," tandas Fadjar.

Setelah viral di media sosial, akun LinkedIn milik Bagaskara Ikhlasulla Arif tidak bisa diakses. Namun, dikutip dari laman PDDikti, Bagaskara Ikhlasulla Arif merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Bagaskara Ikhlasulla Arif berstatus "Lulus" di jenjang Sarjana pada 2016.

Sebelum menjabat sebagai

manager non-government relations Pertamina, ia disebut pernah bekerja di perusahaan pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Salah satu tanggapan keras datang dari lolitikus PDIP Ferdinand Hutahaean. Ferdinand menyoroti betapa beruntungnya Bagaskara dalam memperoleh posisi tersebut.

"Beruntungnya beliau ini jadi ponakan Jokowi," ujar Ferdinand dalam keterangannya di aplikasi X @ferdinand_mpu (6/6/2024).

Ferdinand menyatakan bahwa perpindahan Bagaskara dari BRI ke Pertamina bukanlah hal yang mudah.

"Dari BRI pindah ke Pertamina bukanlah hal mudah," ucapnya.

Ia pun merasa heran dengan perpindahan Bagaskara yang mencakup perpindahan antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



Manager non-government relations di Pertamina, Bagaskara Ikhlasulla Arif

"Pindah direktorat saja di internal Pertamina bukan hal mudah. Ini antar BUMN, cukup mudah mungkin karena dia ponakan Jokowi," cetusnya.

Ferdinand menduga bahwa perpindahan Bagaskara ke Pertamina terkait dengan sektor minyak yang dianggap sebagai "lahan basah."

"Kenapa pindah? Pertamina lebih segar? Lebih licin karena minyak?," tandasnya. (wid,rls,ist/dya)

BPK Sebut Indofarma Terlilit Pinjol



JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan PT Indofarma Tbk (INAF) dan anak usaha PT Indofarma Global Medika melakukan aktivitas yang berindikasi fraud atau kerugian.

Melansir Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang dirilis BPK, INAF bersama PT IGM melakukan transaksi jual beli fiktif pada Business Unit Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Yaitu menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara (Kopnus) serta menggadaikan deposito pada PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) untuk kepentingan pihak lain.

Bahkan pada laporan BPK tersebut INAF juga disebut tengah melakukan

pinjaman online (fintech landing). Selain itu juga menampung dana restitusi pajak pada rekening bank yang tidak dilaporkan di laporan keuangan dan digunakan untuk kepentingan di luar perusahaan.

"INAF juga menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi dan mengeluarkan dana tanpa underlying transaction," tulis laporan IHSP BPK yang dikutip pada Kamis (6/6/2024).

Selanjutnya ditemukan adanya windows dressing laporan keuangan perusahaan. INAF juga dilaporkan membayar asuransi purnajabatan dengan jumlah melebihi ketentuan.

"Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp 278,42 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp 18,26 miliar atas beban pajak dari penjualan fiktif FMCG," tulis laporan IHSP.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK menyarankan kepada Direksi INAF untuk melaporkan ke pemegang saham terkait seluruh hasil temuan BPK. Kemudian berkoordinasi dengan pemegang saham dan Kementerian

BUMN untuk melaporkan permasalahan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan kepada aparat penegak hukum. Selanjutnya menginstruksikan Direksi PT IGM untuk berkoordinasi dengan kantor pajak agar perusahaan tidak dikenakan beban pajak penjualan senilai Rp 18,26 miliar atas transaksi penjualan fiktif Business Unit FMCG.

Belum selesai kasus dugaan fraud Indofarma, kini anak perusahaan BUMN farmasi Kimia Farma yang lain juga dikabarkan melakukan rekayasa keuangan.

Kabar penyelewengan keuangan di anak perusahaan Kimia Farma tersebut bahkan dilontarkan langsung Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga.

Staf dari Menteri Erick Thohir tersebut mengatakan, pihaknya menemukan adanya dugaan rekayasa keuangan salah satu anak usaha Kimia Farma.

"Kimia Farma juga demikian. Ada inilah, rekayasa keuangan," kata Arya Sinulingga dikutip Kamis (6/6/2024).

Bahkan, anak perusahaan Kimia Farma tersebut sudah akan diproses oleh Kementerian BUMN. Kendati demikian, Arya belum menyebutkan secara rinci mengenai anak perusahaan tersebut.

Manipulasi laporan keuangan keduanya berpotensi merugikan negara hingga Rp371 miliar.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, masalah dari kedua BUMN Farmasi tersebut sudah terjadi sejak lama. "Masa lalu, itu masa lalu," ujar Arya saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/6/2024). (wid,rls,ist/dya)

7 'DOSA' INDOFARMA:

1. Melakukan Pinjaman Online (Fintech Lending/Pinjol)
2. Melakukan Transaksi Jual-Beli Fiktif pada Business Unit Fast Moving Consumer Goods (FMCG)
3. Melakukan Kerja Sama Pengadaan Alat Kesehatan Tanpa Studi Kelayakan dan Penjualan Tanpa Analisa Kemampuan Keuangan Customer
4. Menempatkan Dana Deposito atas Nama Pribadi dan Menggadaikan Deposito untuk Kepentingan Pihak Lain
5. Menggunakan Dana Perusahaan untuk Kepentingan Pribadi
6. Melakukan Windows Dressing Laporan Keuangan Perusahaan
7. Membayar Asuransi Purnajabatan dengan Jumlah Melebihi Ketentuan

Sidang Terakhir Dugaan Tindak Asusila Ketua KPU Korban Optimistis DKPP Pecat Hasyim Asy'ari

JAKARTA - Sidang pemeriksaan terakhir dugaan tindak asusila yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) digelar Kamis (6/6/2024). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dikatakan bakal segera membacakan putusan.

"Tadi sidang terakhir ya. Tadi udah ditutup sidangnya. Hasilnya sudah ditutup. Jadi kita tunggu nanti putusannya," kata kuasa hukum anggota PPLN Aristo Pangaribuan usai sidang di gedung DKPP, Jakarta Pusat.

"Dia (DKPP) nggak ngasih tau kapan, karena kan perlu musyawarah. Biasanya itu dalam 3 minggu sampai sebulan," lanjut Aristo.

Pihak korban optimistis gugatan mereka agar Hasyim dipecat. "Optimistis karena buktinya sudah banyak sekali," katanya.

"Kalau putusannya tidak berpihak kepada korban ya saya tidak tahu lagi. Semua bukti sudah kami keluarkan," tambahnya.

Menurutnya, selama 2 kali sidang digelar, mereka juga telah merasakan ada yang tidak beres dari Hasyim pada



perkara ini. "Kata kuncinya itu, penyalahgunaan fasilitas jabatan. Biasa kan pejabat punya banyak fasilitas dan itu digunakan. Makanya tadi sekjen dipanggil, tenaga-tenaga ahlinya itu dipanggil," ujar Aristo.

Sidang lanjutan ini menggali penyalahgunaan fasilitas jabatan oleh Hasyim. "Tadi sidangnya utamanya menggali, kan tadi dilihat ada Sekjen

KPU, ada kesekretariatan, itu agenda utamanya menggali penyalahgunaan fasilitas jabatan yang dilakukan oleh Ketua KPU yang terindikasi menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi, hasrat pribadinya terhadap bawahannya, anggota PPLN," ucapnya.

Sidang ini digelar secara tertutup lantaran berkaitan dengan asusila.

Aristo enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai fasilitas jabatan yang dimaksudnya. Dia mengatakan itu akan dijelaskan dalam putusan DKPP nanti.

"Penyalahgunaan fasilitas jabatan ya yang melekat kepada ketua KPU. Soal substansinya saya nggak bisa. Nanti liat aja di putusan," tuturnya.

"Nanti putusannya akan terbuka katanya tadi saya bilang cuman akan disensor. Kata kuncinya itu, penyalahgunaan fasilitas jabatan. Biasa kan pejabat punya banyak fasilitas dan itu digunakan. Makanya tadi Sekjen dipanggil, TA-TA-nya (Tenaga Ahli) itu dipanggil," sambungnya.

Aristo juga mengatakan relasi kuasa sangat penting untuk didalami dalam persidangan. Dia menilai adanya eksploitasi hubungan atasan dengan bawahan dalam kasus ini.

"Ya sangat penting (mendalami masalah relasi kuasa), karena ini kan core perkaranya, karena ada kesempatan, ada hubungan atasan-bawahan dan hubungan atasan bawahan itu dieksploitasi. Ya dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, hasrat pribadinya ketua KPU," ujarnya. (wid,rls,ist/dya)

Perludem: KPU Seharusnya Abaikan Putusan MA soal Batas Usia

JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA), soal penghitungan batas usia calon kepala daerah. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan, putusan MA yang mengubah syarat usia calon kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pilkada.

"Seharusnya KPU abaikan saja putusan MA. KPU harusnya berpegang pada UU Pilkada," ujar Khoirunnisa saat dihubungi, Rabu (5/6/2024).

Putusan MA soal perubahan syarat usia calon kepala daerah, kata Khoirunnisa, hanya membatalkan aturan di Peraturan di dalam KPU (PKPU). Di sisi lain, untuk syarat usia di UU Pilkada tak berubah. UU tersebut lah yang seharusnya dipatuhi oleh KPU. "Syarat di UU Pilkada-nya kan tidak berubah. Tetap menyatakan bahwa syarat calon itu adalah minimal 30 tahun. Yang dibatalkan MA itu adalah PKPU," kata Khoirunnisa.

Senada, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengingatkan bahwa ada doktrin hukum Purcell Principle yang melarang institusi apapun mengubah

aturan menjelang tahapan pemilu berlangsung.

"Tidak boleh institusi apapun termasuk pengadilan mengubah aturan kepemiluan menjelang pemilu itu terjadi, jadi menjelang saja tidak boleh, apalagi saat tahapan," kata Feri.

Feri mengatakan, doktrin itu berangkat dari pertarungan Purcell melawan Gonzalez di Amerika Serikat pada 2006 lalu yang diwarnai perubahan aturan menjelang pemilu dan dianggap sebagai sebuah kecurangan.

Dalam konteks Pilkada serentak 2024, Feri menyebutkan bahwa tahapan pilkada sudah dimulai, yakni pendaftaran calon independen. Ia mengatakan, perubahan aturan yang diputuskan MA tentu tidak adil karena menguntungkan pihak tertentu. "Kenapa (perubahan aturan jelang pemilihan) dilarang? Karena pasti tidak fair," ujar Feri.

Feri mengatakan, di seluruh dunia, syarat batas minimal usia berlaku ketika peserta pemilihan umum mendaftarkan diri, bukan ketika mereka dilantik.

Oleh karena itu, ia menilai, putusan MA merupakan bentuk kecurangan pemilu karena memanipulasi hukum. "Itulah yang

terlihat hari ini, ada manipulasi-manipulasi," kata Feri.

Sebelumnya diberitakan, MA mengabulkan permohonan hak uji materi (HUM) yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana.

Uji Materi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini dilakukan terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur. "Kabul permohonan HUM," demikian bunyi putusan Nomor 23 P/HUM/2024 dikutip dari situs MA, Kamis (30/5/2024).

Atas putusan ini pula, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon.

Putusan ini diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Yulius serta Hakim Agung Cerah Bangun dan Hakim Agung Yodi. MA hanya memerlukan waktu 3 hari untuk mengubah syarat usia calon kepala daerah ini. (wid,kcm,rls/dya)

DETIL-DETIL PUTUSAN

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa pasal 4 ayat (1) huruf d dalam Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 10 tahun 2016. Atas adanya putusan tersebut, aturan KPU diubah.

Sebelumnya, bunyi pasal 4 ayat (1) huruf d: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

Jika mengacu pada aturan tersebut, mereka yang sudah berusia 30 tahun baru bisa mendaftar gubernur atau wakil gubernur. Lalu berusia 25 tahun untuk bupati atau wakil bupati dan setingkatnya.

Namun aturan tersebut diubah oleh MA menjadi:

Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih.

Perubahan ada pada frasa 'terhitung sejak penetapan' menjadi 'terhitung sejak pelantikan'.

DPRD Kota Malang Usulkan Pembentukan UPT Khusus Kayutangan Heritage



Koridor Kayutangan Heritage di sepanjang Jalan Basuki Rahmad, Kecamatan Klojen Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - DPRD Kota Malang menilai koordinasi antara Diskopindag, Dishub, dan Disporapar dalam mengelola kawasan Koridor Kayutangan Heritage kirang efektif. Diusulkan pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) khusus. Nantinya lembaga ini yang bertanggung jawab atas

pengelolaan secara terpadu.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, Kamis (6/6/2024). Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi wisata dan ekonomi kawasan tersebut, untuk keberlangsungan masa depan yang

lebih baik bagi Kota Malang.

"Selama ini, kami melihat bahwa tidak ada sinergi yang optimal antara perangkat daerah yang terlibat. Mereka ini kan seharusnya bisa bekerja sama lebih baik," ujar Bayu, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (6/6/2024).

Bayu menambahkan, dengan adanya UPT khusus, pengelolaan Kayutangan Heritage dapat dilakukan lebih terpadu dan sesuai dengan kebutuhan.

Saat ini, menurutnya beberapa masalah muncul karena kewenangan yang terbagi lintas perangkat daerah, seperti masalah parkir, pedagang kaki lima (PKL), dan penyelenggaraan kegiatan wisata.

"Saat ini, banyak masalah yang timbul, mulai dari masalah parkir hingga pedagang kaki lima (PKL), bahkan penyelenggaraan kegiatan wisata yang kadang-kadang viral di media sosial," tegasnya.

Lebih lanjut, Bayu juga berharap dengan adanya UPT, kebermanfaatan kawasan ini dapat dirasakan oleh seluruh kalangan, baik dari

masyarakat lokal hingga wisatawan.

Sebab dalam konteks ini, anggota Komisi C DPRD Kota Malang tersebut menegaskan, kawasan heritage seperti Kayutangan bukan hanya tentang menjaga bangunan bersejarah, tetapi juga mengintegrasikan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Oleh karena itu, sinergi antar perangkat daerah dan pembentukan UPT khusus, menjadi langkah penting untuk memastikan revitalisasi yang telah dilakukan dapat berkelanjutan.

Terpisah, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan penataan lebih lanjut terhadap Koridor Kayutangan Heritage akan didalami secara komprehensif. Termasuk mempertimbangkan usulan pembentukan UPT yang perlu kajian lebih mendalam.

"Pembentukan UPT memang salah satu opsi yang sedang kami kaji. Namun, perlu analisis yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa solusi ini benar-benar efektif, termasuk bagaimana dampak pada Kampung Heritage Kayutangan di dalamnya," tegas Wahyu. (Santi/Dya)

PKB Kabupaten Malang Akui Intens Komunikasi dengan Petahana Sanusi

MALANG - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang, Kholiq, mengungkap dirinya telah melakukan komunikasi intensif dengan petahana kepala daerah, Sanusi.

Pembicaraan tersebut terutama membahas dinamika politik serta bakal calon Bupati untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang di November 2024 mendatang.

Kholiq menyebut, di antara banyaknya tokoh politik yang muncul menjelang pendaftaran calon kepala daerah (cakada), ia hanya berkomunikasi secara intensif dengan Sanusi.

"Komunikasi yang paling intens ya dengan Pak Bupati (Sanusi), petahana yang berarti dengan PDI Perjuangan (PDIP)," ujar Kholiq, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (6/6/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ini mengatakan, komunikasi dengan partai politik (parpol) lain juga dilakukan, namun sifatnya hanya melalui telepon dan tidak intensif seperti dengan Sanusi.

"Kalau yang lain juga komunikasi,



Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Kholiq. (Iskandar/Lenteratoday)

tapi lewat telepon saja, tidak bertemu dan intensif. Yang ketemu ya hanya dengan Pak Bupati (Sanusi)," tambahnya.

Lebih lanjut, disinggung terkait wacana koalisi antara PKB dan PDIP untuk Pilkada Kabupaten Malang 2024, Kholiq menyatakan pihaknya masih menunggu perkembangan dinamika politik yang ada.

Namun ia menjelaskan, sejak awal, PKB telah bersedia berkoalisi dengan PDIP, kendati masih menunggu bakal calon kepala daerah yang final akan diusung oleh PDI Perjuangan.

"Ya lihat nanti perkembangan, tapi Insya Allah dalam waktu dekat (rekomendasi turun), infonya seperti itu. Karena dulu PKB kan mau koalisi dengan PDI Perjuangan. Infonya

nunggu PDI Perjuangan keluar (rekom) dulu," jelasnya.

Diketahui, pada Jumat (31/5/2024) kemarin, telah beredar melalui pesan berantai yang berisikan surat undangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, untuk calon kepala daerah. Untuk mengikuti pemantapan tim pemenang daerah Pilkada serentak 2024 di Bogor pada tanggal 5 hingga 7 Juni 2024.

Menanggapi hal tersebut, Kholiq menegaskan akan menunggu rekomendasi resmi dari DPP PDIP. "Kemarin kan (undangan) penugasan Pak Sanusi, bukan rekom. Setelah dari Bogor nanti rekom baru keluar," kata Kholiq.

Kholiq juga menyoroti mekanisme internal partai yang berbeda dalam menentukan bakal calon kepala daerah. Menurutnya, di PKB, rekomendasi bakal calon langsung turun dari DPP tanpa proses penugasan atau pemantapan seperti yang dilakukan PDIP.

"Ya, masing-masing partai itu beda. Kalau di PKB langsung rekom dari DPP. Kalau PDI Perjuangan mungkin ada penugasan (pemantapan) dulu, kalau PKB tidak ada penugasan jadi rekom langsung turun," pungkasnya. (Santi/Dya)

KISAH PUTRI HANDAYANI, ORANG INDONESIA PERTAMA YANG TIBA DI KUTUB SELATAN

PUTRI Handayani menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil tiba di Kutub Selatan. Putri menyelesaikan perjalanannya di Kutub Selatan pada 28 Desember 2023 pukul 13.00 siang waktu Punta Arena, Chile.

Mulai mendaki gunung sejak usia 13 tahun, perempuan asal Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut sehari-hari berprofesi sebagai engineer.

Kegemaran perempuan lulusan Universitas Indonesia ini dalam mendaki gunung membawa Putri menjelajahi enam titik ekstrem di dunia.

Dia kini bahkan menargetkan bisa menjadi orang Indonesia dan perempuan Asia Tenggara pertama yang meraih gelar The Explorer's Grand Slam usai menaklukkan tujuh puncak tertinggi dunia serta Kutub Utara dan Kutub Selatan.

Persiapan Putri ke Kutub Selatan

Mengutip akun YouTube Jelajah Putri yang menceritakan kisah perjalanan Putri mencapai Kutub Selatan.

Sebelum menjelajahi Kutub Selatan, Putri melakukan persiapan fisik dan mental agar kuat berada di tempat dengan suhu mencapai -25 derajat celsius.

"Kalau akses ke gunung dekat, ya paling baik naik gunung. Kalau nggak, (bersiap) melakukan stimulasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti (saat penjelajahan)," ujarnya, dikutip dari siaran akun YouTube Jelajah Putri.

Putri menjelaskan, dia melakukan persiapan fisik terus-menerus dengan lari dan naik tangga. Kemudian, dia pergi ke Swiss dan Perancis untuk berlatih teknis menggunakan ski serta berada di wilayah salju yang dingin.

Dia juga berlatih menyesuaikan diri berada di tempat dengan suhu ekstrem. Karena dia harus menyesuaikan dengan Antartika yang tidak pernah mengalami malam.

Kondisi ini sempat membuat Putri kesulitan karena dia tidak bisa tidur saat ada sinar Matahari meskipun tubuh terasa lelah.

Perjalanan mencapai Kutub Selatan

Putri memulai perjalanan ke Kutub Selatan pada 21 Desember 2023. Dia harus terbang ke titik 89° S di Kutub Selatan dan kemudian menarik sled atau kereta luncur sejauh 2,74 km.

Perjalanan hari kedua dilanjutkan dengan ski sejauh 8,5 km dengan suhu -25 derajat celsius. Saat itu, kondisinya berangin dan Matahari tertutup awan.

Perjalanan hari ketiga kembali diisi dengan ski sejauh 15 km selama 8,5 jam. Putri bersama rombongannya merayakan Hari Natal di perjalanan hari keempat pada 24 Desember 2023.

Di hari kelima, dia telah

melakukan ski sejauh 64,75 km menuju Kutub Selatan.

Pada 26 Desember, perjalanan dengan ski ke pusat Kutub Selatan tinggal 27,75 km. Putri akhirnya tiba di Kutub Selatan pada 28 Desember 2023.

"Halo Indonesia. Alhamdulillah, setelah delapan hari berjalan menggunakan ski dari 89 derajat Selatan menembus dingin, angin, dan salju, tanggal 28 Desember 2023 jam 13.00 siang waktu Punta Arena, Chile, saya sampai di Kutub Selatan," seru Putri.

Di perjalanan itu, Putri juga mampir ke Ceremonial South Pole untuk membentangkan bendera Merah Putih bersama 12 bendera dari negara yang menginisiasi Perjanjian Antartika 1959.

Bertekad raih The Explorer's Grand Slam

Pencapaiannya di Kutub Selatan menjadi penjelajahan keenam Putri untuk meraih gelar The Explorer's Grand Slam.

Lima perjalanan lain dia raih dengan mencapai puncak Gunung Kilimanjaro pada Februari 2016,

Gunung Carstensz Pyramid pada Agustus 2016, Gunung Elbrus pada Juli 2017, Aconcagua pada Februari 2018, dan Denali pada Juni 2022.

Untuk menyelesaikan misi tersebut, Putri berencana mencapai Kutub Utara 90°N pada April 2024, puncak Gunung Vinson Massif pada Desember 2024, dan Gunung Everest pada April-Mei 2025.

Jika berhasil, dia akan menjadi orang Indonesia pertama sekaligus perempuan Asia Tenggara yang mendapat gelar tersebut. Menurutnya, baru ada 15 perempuan dari 73 orang yang memiliki gelar The Explorer's Grand Slam.

Sepanjang perjalanan menaklukkan puncak tertinggi dunia, Putri tak jarang membandingkan dirinya yang orang Asia dengan penjelajah lain. Baginya, orang Asia tidak bisa melangkah selebar orang asing. Orang yang tinggal di iklim Tropis juga jarang merasakan suhu dingin.

"Semua orang ada prosesnya. Tidak perlu rendah diri. Paling tidak, kita sudah memulai. Ya ada batas-batas yang harus kita terima. Ini lho limit-nya kita," ujar Putri. (Kompas)



PRIA DI ATAS 55 TAHUN JANGAN BANYAK MINUM DI MALAM HARI



GURU Besar Bidang Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Dr. dr. Nur Rasyid Sp.U(K) mengatakan pria yang sudah di atas 55 tahun disarankan tidak banyak minum di malam hari karena berisiko memiliki masalah prostat.

"Laki-laki 55 tahun ke atas minum banyak dari pagi sampai maghrib saja, karena dia sudah punya masalah prostat, kalau minum malam bolak balik bangun tidur, belum tentu bangun bisa tidur lagi nanti kualitas tidurnya jadi jelek," kata Prof. Rasyid dalam acara edukasi Siloam Hospital Asri mengenai pengobatan batu ginjal Retrograde Intratrenal Surgery (RIRS) di Jakarta.

Prof. Rasyid mengatakan pada usia di atas 55 tahun biasanya pria sudah mengalami masalah gangguan berkemih, seperti berkemih yang selalu tidak tuntas.

Ia menyarankan pada malam hari minum secukupnya saja yaitu saat makan atau saat minum obat dan tidak minum banyak menjelang tidur.

Masalah berkemih juga bisa dialami oleh anak karena masalah kurang gizi dan dehidrasi. Maka baik anak-anak maupun dewasa disarankan hidup sehat dan banyak

bergerak agar tidak terjadi masalah berkemih seperti pengendapan batu di ureter atau batu ginjal karena pengerasan urin.

Ia juga mengatakan volume berkemih yang sehat adalah 2,5 liter sehari dengan intensitas minum lebih dari 2 liter. Hal itu untuk mencegah pembentukan batu di ginjal yang diakibatkan karena kurangnya cairan sehingga cairan urin mengeras dan menetap di ginjal.

Ketika memasuki usia 40 tahun ke atas Prof. Rasyid juga menyarankan untuk melakukan check up kesehatan minimal setahun sekali dan sebaiknya juga melakukan USG untuk mengetahui adanya batu ginjal atau tidak.

"Begitu orang masuk 40 tahun ke atas setahun sekali check up, dan baiknya di USG karena batu ukuran dua milimeter dengan USG ketemu loh, sayangnya check up kan seringnya dengan lab, itu ga ketemu," katanya.

Dokter spesialis urologi yang berpraktik di Siloam Hospitals Asri ini mengatakan USG bisa memperlihatkan masalah baik di ginjal maupun ureter untuk melihat sumbatan yang menyebabkan masalah. Disarankan juga

menggunakan USG tanpa kontras karena penggunaan kontras bisa berisiko mengganggu fungsi ginjal.

Tiga kunci

Terpisah Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan perlu adanya fokus dalam tiga langkah penanganan penyakit ginjal kronis, yang pertama yaitu deteksi dini serta tata laksana.

"Yang kedua, akses layanan kesehatan yang setara dan terapi baru sebagai hak semua orang," kata Dante dalam "Ginjal Sehat untuk Semua" yang disiarkan oleh Kementerian Kesehatan di kanal YouTube resminya di Jakarta.

Yang ketiga, katanya, adalah pemberdayaan pasien serta komunitas sebagai kunci pencegahan dan pengendalian penyakit ginjal kronis.

Di Indonesia, lanjutnya, penyakit ginjal kronis adalah penyebab kematian tertinggi ke-10, dengan prevalensi hampir 750 ribu jiwa pada usia lebih dari 15 tahun.

"Riset Kesehatan Dasar menyebutkan bahwa peningkatan proporsi penduduk dengan kasus

ginjal yaitu 0,2 persen pada tahun 2013, meningkat menjadi 0,4 persen pada tahun 2018," katanya.

Selain itu, kata dia, penyakit tersebut menyebabkan beban pembiayaan yang tinggi. Mengutip BPJS, dia menyebut bahwa pada 2023, terdapat peningkatan pembiayaan penyakit ginjal kronis dari 2,1 triliun di tahun 2022 menjadi 2,9 triliun di 2023.

"Bayangkan. 0,8 triliun, hampir 1 triliun dalam waktu 1 tahun," katanya.

Dia menjelaskan bahwa strategi Kementerian Kesehatan dalam penanganan penyakit itu tertuang dalam transformasi kesehatan tahun 2021-2024, yakni cara-cara promotif dan preventif seperti deteksi dini, penguatan layanan rujukan peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan, dan membangun serta memperkuat kemitraan.

Dalam kesempatan itu, Wamenkes mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pencegahan melalui media sosial, gelar wicara, dan lain-lain, sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan kesadaran tentang penyakit itu, juga untuk membangun komitmen bersama (Antara)



"Laki-laki 55 tahun ke atas minum banyak dari pagi sampai maghrib saja, karena dia sudah punya masalah prostat, kalau minum malam bolak balik bangun tidur, belum tentu bangun bisa tidur lagi nanti kualitas tidurnya jadi jelek,"

Prof. Dr. dr. Nur Rasyid Sp.U(K)

MASUK INDONESIA, ZEEKR AMBIL SEGMENT EV MEWAH

PRODUSEN kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) asal Tiongkok, Zeekr, resmi bakal memasuki pasar EV Indonesia dengan menasar segmen mobil listrik premium alias mewah.

Merek yang berada di bawah naungan Geely Holding Group itu pun percaya diri dapat bersaing dengan produk-produk kelas atas yang telah bertengger di Indonesia.

"Merek mewah lain punya reputasi bagus, teknologi, material, dan desain. Kami juga punya, kami punya desain yang mewah, kami juga punya teknologi, dan desain seperti brand Eropa," ujar Managing Director & Head of SEA Region Zeekr, Alex Bao Zhuangfei di Jakarta.

Alex menyebut, konsep gabungan desain Eropa yang mewah dan penuh gaya dengan teknologi otomotif canggih dari China menjadi nilai tambah yang ditawarkan Zeekr kepada calon konsumen barunya di Tanah Air.

Teken kerja sama yang dihadiri oleh eksekutif senior dari kedua perusahaan, termasuk JinHong Lin Darwin, dan Managing Director & Head of SEA Region Zeekr, Alex Bao Zhuangfei ini bertujuan untuk memperkenalkan kendaraan listrik inovatif dan mutakhir dari Zeekr ke pasar Indonesia.

Darwin mengatakan, perusahaan juga berencana untuk memproduksi kendaraan Zeekr secara lokal, meski masih membutuhkan waktu.

Adapun model-model yang akan dikenalkan ke pasar Tanah Air dalam waktu dekat adalah Zeekr X dan Zeekr 009.

"Kami punya desain yang mewah

dan premium, nilai tambahnya kita mempunyai teknologi termutakhir untuk mobil listrik. Gabungkan kedua hal ini yang membuat kami memiliki lebih banyak opsi dibandingkan brand lain," kata dia.

Pada debutnya di Indonesia, Zeekr akan memboyong dua model mobil listriknya, yakni sebuah SUV Zeekr X, dan sebuah MPV mewah Zeekr 009.

Sementara itu pada pameran otomotif di Bangkok Thailand, baru-baru ini, Alex menyebut, Zeekr berhasil mencuri perhatian konsumen dengan mencapai 400 pemesanan.

"Di sana kami dapat pesanan 400 unit, padahal saat itu baru sebatas debut, dan bukan peluncuran. Kami masih bisa lebih baik bila dibandingkan kompetitor lain," imbuh Alex.

Pada kesempatan yang sama, JinHong Lin Darwin, Managing Director PT Premium Auto Prima selaku agen

pemegang merek Zeekr di Indonesia, mengungkapkan Zeekr memiliki rekam jejak yang sangat baik dan bertumbuh pesat di pasar dunia, meski baru berdiri sejak 2021.

"Mungkin Zeekr relatif baru, tetapi Zeekr ini dibawa oleh suatu grup otomotif global, yang sudah mendunia, di mana pusat riset dan pengembangan desainnya bukan hanya di China, tetapi juga di Eropa, di China dan di Eropa model-model Zeekr sudah bisa diterima bahkan menjadi suatu saingan. Apalagi Zeekr 009, sudah dianggap setara dengan super vehicle brand yang ada di Eropa," kata dia.

"Rencana besar kami memang ada (produksi lokal), namun implemen-

tasinya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini, kita akan memperkenalkan produk Zeekr dulu, dan saat ini kita sedang pelajari untuk perakitan lokal," kata dia.

Zeekr, merek di bawah Geely Holding Group, dikenal dengan kendaraan listrik canggih di segmen premium yang menggabungkan performa tinggi dengan kemewahan dan keberlanjutan.

Lebih lanjut, Alex Bao Zhuangfei menilai pertumbuhan mobil listrik di Indonesia sangat pesat dan memiliki pasar yang sangat luas di Asia, yang menjadi alasan perusahaan berekspansi ke Tanah Air.

"Indonesia adalah pasar penting bagi Zeekr, industri EV di sini berkembang sangat pesat, dan kami ingin ikut mengambil kesempatan untuk mengenalkan produk canggih dari kami, sekaligus berkontribusi pada lingkungan di wilayah ini," imbuhnya.

Pada tahap awal, Zeekr menargetkan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung untuk mengenalkan produknya. Dimulai dengan pembukaan flagship showroom di Jakarta Selatan, dan berkembang ke BSD City. (Antara)



Zeekr 009



DXI 2024

DEEP AND EXTREME INDONESIA



WISATA PETUALANGAN INDONESIA DIGENJOT LEWAT OLAHRAGA EKSTREM

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memperkenalkan dan memperluas industri olahraga ekstrim lainnya dalam Event pameran olahraga ekstrim, diving, olahraga air, dan outdoor adventure Deep and Extreme Indonesia 2024 (DXI 2024).

Pameran ini diharapkan dapat membuka pasar baru untuk memperkuat industri wisata di Indonesia.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Vinsensius Jemadu mengatakan DXI 2024 menjadi ajang promosi wisata petualangan yang ada di Indonesia melalui olahraga ekstrem.

Mengusung tema Edge of Tomorrow: Dive Into the Depth of Extreme Sports, pameran DXI 2024 ingin memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjungnya.

Vinsensius Jemadu mengatakan, olahraga ekstrim memiliki hubungan yang erat dengan industri pariwisata di Indonesia.

Sebagai negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia menawarkan beragam tempat yang ideal untuk praktek olahraga ekstrim, seperti surfing, diving dan kegiatan olahraga ekstrim lainnya.

"Alhamdulillah hari ini kita membuka kembali DXI. Kita bersyukur bahwa event ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman bahkan juga di daerah untuk bisa mengembangkan wisata-wisata selam, surfing, fishing yang

mempunyai potensi luar biasa," ucapnya.

Vinsensius berharap, adanya pameran DXI bisa menjadi ajang untuk mempromosikan potensi pariwisata Indonesia dalam hal olahraga ekstrim.

Sebab, pameran DXI ini juga sejalan dengan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong wisatawan bukan hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitasnya.

Menurutnya, kegiatan olahraga ekstrim seperti surfing adalah masuk dalam kategori minat khusus yang berpotensi untuk menyumbang pada perekonomian negara dan lokal lewat pariwisata.

"Kalau kita lihat dari perspektif pariwisata kegiatan yang dirangkaikan dalam pameran DXI ini masuk dalam kategori minat khusus. Sekarang paradigmanya kan sekarang sudah berubah tidak hanya quantity tapi quality. Jadi yang kita kejar adalah spending dan length of stay daripada produk wisata kita. Diving surfing dan lain-lain itu mereka akan tinggal lebih lama," jelasnya.

Presiden Direktur Dyandra Event Solutions, Michael Bayu Sumariyanto mengatakan, pameran DXI 2024 dapat memberikan dukungan yang signifikan terhadap pariwisata di Indonesia.

Melalui DXI 2024, Indonesia dapat memperkenalkan destinasi-destinasi wisata yang dapat menjadi tempat untuk melaksanakan olahraga ekstrim, seperti surfing, paragliding,

mountain biking, dan lain sebagainya.

"DXI 2024 bertujuan untuk menjadi platform promosi yang efektif bagi industri olahraga air, ekstrim dan outdoor lifestyle, serta menjadi wadah untuk memperkenalkan potensi wisata alam Indonesia yang kaya dan menantang," ucapnya.

Bayu berharap penyelenggaraan DXI tahun ini juga bisa menjadi wadah yang tepat untuk seluruh stakeholder bertemu dan bertukar informasi serta ide terkait olahraga ekstrim di Indonesia.

Sehingga bisa menghasilkan gagasan menarik untuk meningkatkan minat olahraga ekstrim di Indonesia serta berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan baik luar maupun dalam negeri.

Bayu menambahkan, untuk pameran DXI tahun ini diikuti oleh lebih dari 150 exhibitor yang terdiri dari berbagai macam komunitas hingga industri pendukung berbagai jenis olahraga ekstrim.

Pada tahun ini, DXI menargetkan kehadiran lebih dari 30.000 pengunjung dan transaksi sebesar 12 miliar rupiah selama empat hari penyelenggaraan pameran.

"Kami sangat berharap, melalui DXI 2024, dapat tercipta sinergi yang kuat antara para pelaku industri, komunitas, dan pemerintah dalam memajukan sektor olahraga ekstrim dan pariwisata Indonesia. Harapan kami, DXI 2024 tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk terus

mengembangkan industri olahraga air dan ekstrim di Indonesia," jelas Bayu.

Project Manager DXI 2024, Aquila Sumampouw mengatakan, berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk memeriahkan pameran DXI 2024.

Selain pameran, ada juga talk show, Scuba Experience di Tank Besar, Test Ride Motor Adventure hingga Mermaid Show selama pameran berlangsung (Bisnis)



Menteri PUPR dan ... (dari Hal 1)

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tak menyangka dan menyesal ternyata publik begitu marah atas program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disiapkan pemerintah.

Karena itu, Basuki menyatakan bahwa program ini tak perlu terburu-buru dilaksanakan jika belum siap diterima masyarakat.

Basuki pun membandingkan bahwa pemerintah hingga saat ini telah mengucurkan dana sebesar Rp 105 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara, dana dari iuran Tapera membutuhkan waktu 10 tahun hanya untuk mengumpulkan anggaran sebesar Rp 50 triliun.

"Menurut saya pribadi kalau emang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP untuk subsidi bunga," ucap Menteri PUPR Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

"Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun. Jadi effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Saya enggak ngelegowo lah (enggak menyangka)," sambung dia.

Basuki juga menjelaskan bahwa aturan mengenai iuran Tapera sebetulnya sudah disiapkan sejak 2016.

Namun, kebijakan itu baru bisa diterapkan pada 2027. Itu pun dengan status "diundur".

Faktor mengapa akhirnya pemerintah membuka opsi kebijakan iuran Tapera diundur hingga 2027 karena untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat.

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian, kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027," katanya.

Basuki menambahkan, pemerintah siap menerima masukan, misalnya dari DPR RI, apabila diminta agar program iuran Tapera diundur.

Ia menyatakan, pihaknya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengikuti masukan tersebut.

"Jadi, kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya waktu MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga, kita akan ikut," imbuh Basuki.

Ketentuan mengenai Tapera ini dihujani kritik dan dikeluhkan oleh publik lantaran bakal memotong penghasilan para pekerja. Pengusaha pun bakal diwajibkan membayar sebagian iuran dari para pekerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menyebutkan, besaran simpanan Tapera adalah 3 persen dari gaji atau upah. Sebanyak 2,5 persen

ditanggung pekerja, sedangkan sisanya ditanggung pemberi kerja.

Kebijakan ini pun mendapat respons negatif dari masyarakat. Sampai-sampai, kelompok buruh turun ke jalan menolak kebijakan ini.

Terpisah Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih 2024 - 2029 Prabowo Subianto bicara mengenai polemik iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai penolakan dari masyarakat. Prabowo mengatakan saat ini pemerintah masih mencari solusi yang terbaik.

"Kita akan pelajari dan kita cari solusi terbaik," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (6/6/2024).

Namun Komisioner BP Tapera Heru Pudyro Nugroho mengatakan pemberlakuannya belum tentu akan berlaku pada tahun 2027. Ia mengatakan PP yang terbit tahun ini untuk menyempurnakan tata kelola saja.

"Terkait dengan PP No.25 tahun 2020, ini memang sudah diterbitkan di tahun 2020, dan kalau yang sekarang diperbincangkan terkait PP No.21 2024 sebenarnya PP itu untuk menyempurnakan aspek tata kelolanya saja, substansi lain tidak berubah," kata Heru di Gedung BP Tapera, Rabu (5/6/2024).

Ia menyebut memang benar PP menetapkan pemungutan iuran Tapera selambat-lambatnya 7 tahun setelah dikeluarkannya PP No.25 tahun 2020. Tetapi, aturan itu tidak pasti, tergantung dengan kesiapan BP Tapera.

"Itu memang selambat-lambatnya 7 tahun. Jadi kalau timeline 2027 tidak saklek seperti itu. Tergantung bagaimana kesiapan BP Tapera. Masih banyak PR (pekerjaan rumah) dari komite yang diketahui PUPR, beranggotakan menkeu, dari Anggota Komisioner OJK juga yang masih terus harus kami upayakan, terutama dalam peningkatan kualitas tatakelola," ujar Heru.

Ia melanjutkan, jika pihaknya sudah dinyatakan siap oleh pemerintah untuk memulai pemungutan iuran, proses sosialisasi akan dilakukan terlebih dahulu.

"Apa yang jadi dasar pungutan, apakah gaji pokok dari pekerja, penerima upah, atau dari take home pay, atau dari apa, itu kan masih diskusi yang panjang," ucapnya.

Heru juga mengakui BP Tapera masih memiliki PR untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam menjalankan aturan ini.

"Tapi PR-nya untuk membenahi tata kelola dalam rangka BP Tapera membangun trust ke masyarakat, itu harus dibangun dulu. Jadi saya nggak bisa bilang 2027 dilaksanakan, nggak juga, tergantung," imbuhnya.

Buruh Beri Waktu Sepekan

Kalangan buruh mengancam akan melanjutkan aksi demo yang lebih luas dan lebih besar jika pemerintah tidak segera mencabut kebijakan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan tersebut

tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2024 tentang Perubahan atas PP No.25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

"Bila mana ini tidak dicabut, maka akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia dan melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat ditemui dalam aksi demo buruh di kawasan Patung Kuda Monas, Kamis (6/6/2024).

Said yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu menyebut, terdapat sejumlah alasan mengapa pihaknya mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan Tapera. Diantaranya, tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera termasuk buruh, untuk mendapatkan rumah. Mengingat, potongan 3% dari penghasilan pekerja buruh dinilai tidak cukup untuk membayar uang muka, apalagi membeli rumah. Kedua, pemerintah tidak mengiur dana Tapera tetapi mengelola uang masyarakat.

Dia menyebut, pemerintah tidak memiliki hak untuk memotong upah buruh dan upah dari pengusaha.

Ketiga, membebani buruh, lantaran saat ini saja penghasilan para pekerja buruh sudah dipotong hampir 12% diantaranya untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PPh21. Selain itu, Said mengatakan bahwa daya beli buruh turun sebesar 30% akibat upah yang naiknya hanya sekitar 1,58% sedangkan inflasi 2,8%.

"Bisa-bisa buruh pulang ke rumah hanya bawa slip gaji," ujarnya.

Minggu depan, kalangan buruh berencana untuk mengajukan judicial review terhadap PP No.21/2024 ke Mahkamah Agung. Said juga menyebut, pihaknya tengah mempersiapkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira merespons, Tapera memberatkan pekerja lantaran diwajibkan ikut dalam kepesertaannya. Iuran Tapera juga relatif besar dengan penghitungan persentase dari gaji.

"Jika pekerja tersebut berpendapatan di atas upah minimum regional, maka setiap bulan gaji pekerja itu dipotong 2,5 persen," kata Bhima dalam Policy Brief Tapera untuk Siapa? Menghitung Untung Rugi Kebijakan Tapera.

Kondisi ini juga mengancam industri pengolahan karena banyak pabrik terpaksa menutup operasional. Celios pun menyarankan pemerintah mengubah kebijakan ini agar hanya untuk ASN, TNI/Polri, sedangkan pekerja formal dan pekerja mandiri bersifat sukarela.

Sementara, Direktur Ideas, Yusuf Wibisono menyatakan, pemerintah harus memiliki terobosan baru memenuhi kebutuhan rumah rakyat tanpa melalui pemotongan gaji pekerja. Menurut Yusuf, backlog atau kesenjangan kebutuhan dan pasokan rumah di Indonesia mencapai 18 persen. Dengan jumlah rumah tangga sekitar 67 juta, backlog itu sekitar 12,7 juta keluarga.

"Pemerintah sebaiknya membatalkan kebijakan potongan gaji pekerja untuk Tapera dan fokus pada upaya memenuhi kebutuhan rumah 18 persen keluarga Indonesia menuju zero backlog," kata Yusuf, pada 29 Mei 2024.

Yusuf juga memberikan saran kebijakan, yaitu mengembalikan Kementerian Perumahan Rakyat, menyediakan tanah dan menghapus biaya tinggi pembangunan rumah rakyat, meminimalkan biaya produksi dan harga jual rumah rakyat diikuti meningkatkan daya beli, merevitalisasi BUMN, serta mendorong efisiensi perbankan dan menekan suku bunga KPR. (ist,ant,tmp, wid,rls/dya)

APA ITU TAPERA?

Tapera adalah program tabungan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari PNS, TNI/Polri, pekerja swasta, pekerja mandiri, hingga pengusaha dapat menjadi peserta Tapera. Program ini dijalankan berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Pengelolaan dana Tapera

Proses pengelolaan dana Tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Simpanan hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan beserta hasil pemupukannya setelah masa kepesertaan berakhir.

Ketentuan potongan wajib

Ketentuan potongan wajib Tapera tertuang di dalam beberapa pasal di Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, yakni:

Tiap pekerja yang berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta Tapera.

Peserta tergolong dari pekerja PNS atau ASN, TNI-Polri, BUMN, BUMD dan juga karyawan swasta dan pekerja mandiri. Pekerja mandiri harus mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta kepada Badan Pengelola (BP) Tapera.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji. Dimana ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan Pekerja sebesar 2,5 persen.



Israel Gempur Sekolah PBB di Gaza, Korban Tewas Capai 40 Orang

RAFAH - Korban tewas akibat serangan Israel ke sebuah sekolah yang dikelola PBB di Nuseirat di Jalur Gaza pada Kamis (6/6/2024), bertambah menjadi 40 orang, dengan 73 lainnya terluka. Dari jumlah korban tewas tersebut, terdapat 14 anak-anak dan 9 wanita.

Sebelumnya, direktur komunikasi badan PBB UNRWA Juliette Touma mengatakan bahwa jumlah orang yang dilaporkan tewas dalam serangan Israel di sekolah Nuseirat adalah antara 35 dan 45 orang. Ia menambahkan bahwa jumlah tersebut belum dapat dikonfirmasi pada saat ini.

Militer Israel mengklaim ada 20-30 pejuang Hamas yang ditempatkan di sekolah badan pengungsi Palestina PBB tersebut.

Tentara Israel mengatakan sebuah jet tempur melakukan serangan tepat terhadap kompleks Hamas yang terletak di dalam sekolah UNRWA di daerah Nuseirat pada Kamis ini.

Serangan itu terjadi setelah militer mengatakan telah melancarkan operasi udara dan darat baru di Gaza tengah dan kelompok medis internasional melaporkan melonjaknya korban jiwa. Operasi terbaru ini tampaknya menandai perluasan serangan Israel selama hampir delapan bulan, yang diluncurkan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir Al-Balah menerima setidaknya 30 jenazah akibat serangan di sekolah tersebut dan enam lainnya dari serangan terpisah di sebuah rumah, menurut catatan rumah sakit dan reporter Associated Press.

Militer Israel mengatakan jet tempurnya menyerang sekolah yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina, yang dikenal dengan singkatan UNRWA. Militer Israel mengklaim tanpa bukti, bahwa Hamas dan Kelompok Jihad Islam menggunakan sekolah tersebut sebagai kedok untuk operasi mereka.

Sekolah-sekolah UNRWA di Gaza telah berfungsi sebagai tempat perlindungan sejak dimulainya perang Gaza. "Sebelum serangan, sejumlah langkah diambil untuk mengurangi risiko merugikan warga sipil yang tidak terlibat dalam serangan tersebut, termasuk melakukan pengawasan udara, dan informasi intelijen tambahan," kata militer Israel.

Hamas: Rencana Biden Omong Kosong!

Pihak Hamas mengomentari rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mendesak Israel melakukan gencatan senjata di Gaza. Hamas menegaskan Biden hanya sekadar berkata-kata atau omong



Pemboman Israel terhadap sebuah sekolah yang menampung pengungsi di kamp pengungsi Al-Nuseirat di Gaza tengah telah menewaskan 40 orang, termasuk 14 anak-anak dan sembilan wanita. (afp)

kosong

Dilansir AFP, Kamis (6/6/2024), Hamas menegaskan kelompok militan Palestina, sampai saat ini, belum menerima komitmen tertulis apa pun terkait gencatan senjata. Padahal, Biden pekan lalu bicara terkait rencana tiga fase Israel yang akan mengakhiri konflik, membebaskan semua sandera, dan mengarah pada rekonstruksi wilayah Palestina yang hancur tanpa kekuasaan Hamas.

Rencana itu pun kini ditepis mentah-mentah oleh Hamas. Salah satu Pejabat Hamas, Osama Hamdan, menegaskan Biden omong kosong.

"Tidak ada usulan, itu hanya omong kosong yang diucapkan Biden dalam pidatonya," ucapnya.

Hamdan memastikan sejauh ini pihak AS belum menyampaikan apapun secara dokumen terkait komitmen gencatan senjata dari Biden. "Sejauh ini, Amerika belum menyampaikan apa pun yang terdokumentasi atau tertulis yang membuat mereka berkomitmen pada apa yang dikatakan Biden dalam pidatonya," katanya dari ibu kota Lebanon.

Hamdan mengatakan Biden

"berusaha menutupi penolakan Israel" terhadap kesepakatan lain yang ditawarkan pada awal Mei, yang telah disetujui oleh Hamas.

Dia mengatakan Hamas bersedia menerima kesepakatan apa pun yang memenuhi tuntutan inti gerakannya, yaitu gencatan senjata permanen di Gaza dan penarikan total pasukan Israel dari wilayah tersebut.

Sebagai informasi, serangan militer Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 36.654 orang. Sebagian besar korban merupakan warga sipil.

RI Kirim 4 Batalyon Pasukan

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan menyiapkan brigade yang terdiri dari empat batalyon untuk dikirimkan sebagai pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, jika Republik Indonesia mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurutnya empat batalyon itu terdiri dari Batalyon Support, Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni, dan Batalyon Perbekalan. Menurutnya empat batalyon itu bakal terdiri dari 1.212 personel.

"Kita akan membentuk Brigade Komposit yang terdiri dari Batalyon Support, Batalyon Zeni, kemudian Batalyon Kesehatan, dan Batalyon Perbekalan, ke sana," kata Agus usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, Batalyon Kesehatan memiliki kemampuan perawatan medis karena dilengkapi dengan dokter. Kemudian Batalyon Zeni menurutnya memiliki kemampuan untuk membuat konstruksi pembangunan, dan Batalyon Perbekalan memiliki kemampuan untuk membuat dapur umum

Sedangkan Batalyon Support disiapkan untuk membantu pengamanan bagi personel-personel yang bertugas nantinya di Gaza. Menurutnya pasukan-pasukan pengamanan tetap diperlukan karena di daerah tersebut masih terjadi konflik.

"Jadi kita tetap mengamankan pasukan kita yang membantu," ucap dia.

Selain itu, dia mengatakan TNI juga menyiapkan dua kapal rumah sakit dalam misi perdamaian tersebut, yaitu KRI Rajiman dan KRI Suharso. Menurutnya dua kapal rumah sakit itu bisa membantu perawatan bagi masyarakat yang terdampak konflik.

"Itu bisa merawat di dalam kapal, dan juga ada unit darurat bisa operasi kelas satu, ada x-ray dan ada UGD," tuturnya. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan pengiriman pasukan itu masih menunggu proses yang cukup lama karena menunggu mandat dari PBB. Selain itu, pihaknya juga membahas rencana evakuasi korban sipil.

"Nanti kita kirim RS lapangan dan kita bisa evakuasi korban sipil yang ada di Gaza untuk dibawa ke Indonesia," kata Herindra. (afp,ant,ist,wid/dya)

143 Negara

Mendukung

JUMLAH SUARA YANG MENDUKUNG
RESOLUSI PALESTINA SEBAGAI
ANGGOTA PENUH DI PBB (10 MEI 2024)

25 Negara

Abstain

9 Negara

Menolak